

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris, dimana sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian dan keberadaan lahan pertanian memiliki peran strategis bagi Indonesia yang mayoritas makanan pokok penduduknya adalah beras.

Seiring dengan meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk yang semakin besar dan pengaruh kemajuan industri, tentunya kebutuhan akan lahan yang difungsikan sebagai perumahan semakin meningkat yang menuntut adanya keseimbangan lingkungan, terutama di daerah perkotaan. Namun, karena kelangkaan tanah, biaya tanah dan perumahan sangat tinggi.

Alhasil, kabupaten dengan akses paling mudah menuju kawasan kota menjadi pilihan alternatif pemasok lahan pemukiman.

Ketersediaan lahan yang dinilai cukup luas dan harga lahan yang masih rendah, menjadi keuntungan tersendiri dalam mengembangkan kawasan perumahan di daerah kabupaten sekitar kota. Keuntungan tersebut menjadi peluang (*Opportunity*) utama bagi pengembangan kawasan (*Developer*) perumahan sehingga memunculkan fenomena alih fungsi lahan, yaitu dari sektor pertanian ke sektor perumahan yang berakibat pada pergeseran perubahan sosial ekonomi masyarakat. Akan tetapi yang menjadi permasalahan utamanya adalah lahan yang

dipakai untuk pembangunan kawasan perumahan tersebut adalah lahan pertanian yang masih produktif digunakan sebagai daerah bercocok tanam.

Penggunaan lahan didefinisikan oleh Lestari. Perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari peruntukan semula (sesuai peruntukan) menjadi fungsi lain yang menimbulkan dampak (permasalahan) negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri dikenal dengan istilah alih fungsi lahan. Misalnya, mengubah properti yang belum dikembangkan menjadi lahan yang dikembangkan.¹

Kabupaten karawang merupakan salah satu daerah penghasil beras kedua di Indonesia yang dijuluki dengan kota lumbung padi nasional dan sebagian besar padi ditanam pada lahan sawah irigasi. Akan tetapi seiring dengan terus meningkatnya angka pertumbuhan penduduk dan majunya sektor industri, menjadikan Karawang sebagai salah satu daerah yang terkena dampak pengalihfungsian dari lahan pertanian menjadi perumahan.

Menurut data Statistik Daerah Kabupaten Karawang 2020, jumlah penduduk Kabupaten Karawang pada tahun 2019 berdasarkan hasil proyeksi adalah 2.353.900 jiwa. Dengan luas Kabupaten Karawang sebesar 1.753,27 KM², tingkat kepadatan penduduk sebanyak 1.343 jiwa.² Untuk lebih jelasnya, dirincikan dalam tabel dibawah ini:

¹ Wisnu Sasongko, dkk., *Konversi Lahan Pertanian Produtif Akibat Pertumbuhan Lahan Terbangun Di Kecamatan Kota Sumenep*, Jurnal Plano Madani: Perencanaan Wilayah Dan Kota., Volume 6 Nomor 1. (2017), hlm. 16.

² Data Proyeksi Penduduk Karawang 2010-2020 dalam BPS Kabupaten Karawang Tahun 2019

Tabel 1. 1

**Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Karawang
Tahun 2015-2019**

Tahun	Jumlah	Tingkat kepadatan penduduk/KM²
2015	2.273.579	1.094
2016	2.295.778	1.039
2017	2.316.489	1.321
2018	2.336.009	1.332
2019	2.353.900	1.343

Sumber : Proyeksi Penduduk Karawang 2010-2020 dalam BPS Kabupaten Karawang Tahun 2019

Dari tabel diatas, diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Karawang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 selalu meningkat setiap tahunnya. Pun sama halnya dengan tingkat kepadatan penduduk per KM².

Kabupaten Karawang terdiri dari 30 kecamatan, salah satu diantaranya adalah Kecamatan Klari dengan luas wilayah 59.37 KM².

Adapun penggunaan luas lahan di Kabupaten Karawang pada tahun 2018 diperinci menjadi 3 bagian, yaitu Lahan Sawah seluas 95.287 Ha, lahan Pertanian Bukan Sawah sebesar 38.805 Ha, dan lahan bukan pertanian sebesar 41.167 Ha.

Tabel 1. 2**Luas Lahan Pertanian Kabupaten Karawang Tahun 2015-2018**

Tahun	2015	2016	2017	2018
Luas Lahan Sawah	96.482	95.906	95.536	95.287
Lahan Pertanian Bukan Sawah	39.402	38.150	33.424	30.805

Sumber: Proyeksi Penduduk Karawang 2010-2020.

Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan luas lahan pertanian di kabupaten Karawang, baik lahan sawah maupun lahan pertanian bukan sawah. Hal ini berarti bahwa lahan pertanian di Kabupaten Karawang penggunaannya dialihfungsikan, bukan sebagai lahan pertanian lagi.

Tabel 1. 3**Luas Lahan Pertanian Kecamatan Klari**

Tahun	2015	2016	2017	2018
Luas lahan sawah	2.060	1.580	1.477	1.350
Lahan pertanian bukan sawah	1.948	1.648	1.648	1.648

Sumber : Proyeksi Penduduk Karawang 2010-2020.

Begitupun dengan luas lahan pertanian di Kecamatan Klari pada data dari Tahun 2015-2018, yang justru menyusut sangat drastis dari 2.060 menjadi 1.350 pada luas lahan sawah dan berarti penurunan terjadi sebesar 710 Ha. Dan

penyusutan lahan pertanian bukan sawah sebesar 300 Ha dari 1.948 Ha menjadi 1.648 Ha.

Selain itu pada tahun 2018, luas produksi padi di Kabupaten Karawang sebesar 1.101.288,61 Ton yang terdiri dari padi sawah dan padi ladang dengan Kecamatan Klari urutan ke-3 produktivitas padi sawah terbesar dengan jumlah 507 Kuintal/Ha dan padi ladang sebesar 42.05 Kuintal/Ha.³

Salah satu desa di Klari yang pembangunan perumahannya cukup tinggi adalah desa Duren. Secara geografisnya, Desa Duren sangatlah strategis dengan adanya lalu lintas jalur utama. Bagian Utara Desa Duren di kampung Kawali telah ada 3 perumahan yaitu perumahan Kosambi, Perumahan Kandiwa 1, Perumahan Kandiwa 2 dan yang baru saja dibangun Perumahan The Kraton. Dan di bagian selatan ada perumahan Bumi Kosambi Permai. Beberapa lahan perumahan ini diambil dari pengalihfungsian lahan pertanian.

Oleh karena itu, tentu saja pengalihfungsian lahan pertanian menjadi perumahan di Desa Duren Kecamatan Klari ini berdampak pada perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat desa yang dipengaruhi oleh semakin banyaknya jumlah penduduk dan kemajuan industri.

Salah satu dampak ekonomi dari pengalihfungsian lahan pertanian ke perumahan di Desa Duren yang menjadi faktor utama yaitu dalam mengganti mata pencaharian, yang tadinya berprofesi petani menjadi memilih bekerja di bidang industri karena banyaknya sektor industri. Menurut teori Irawan (2005) dan santosa

³ Data Proyeksi Kabupaten Karawang Dalam Angka 2019

yang menyatakan bahwa adanya alih fungsi lahan pertanian berakibat kepada petani yang akan kehilangan pendapatannya. Jika lahan dialihfungsikan, khususnya sawah produktif yang menyerap banyak tenaga kerja, maka pilihan pekerjaan akan berkurang, sehingga berdampak pada penurunan pendapatan petani. Aksesibilitas ekonomi rumah tangga petani terhadap pangan tentu saja akan dirugikan ketika pendapatan petani menurun.⁴

Adapun dampak sosial dari pengalihfungsian lahan pertanian di Desa Duren seringkali mengakibatkan pencemaran limbah rumah tangga dan sering terjadi banjir setiap tahunnya pada musim hujan. Daerah yang terkena banjir di Desa Duren adalah Perumahan Puri Kosambi 2, perumahan BKP, perumahan kandiwa ini diakibatkan kurangnya resapan air, kurangnya saluran air dan banyaknya limbah rumah tangga di saluran air yang ada.

Dilihat dari realitas kondisi diatas, yang menjadi menarik perhatian dan menonjol yang diteliti oleh penulis adalah adanya pengalihan profesi buruh tani atau petani yang bekerja di sawah menjadi pedagang atau buruh pabrik yang bekerja di sektor industri sebagai dampak dari beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi perumahan. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti lebih jauh tentang bagaimana perubahan sosial ekonomi masyarakat Desa Duren terhadap pengalihfungsian lahan pertanian menjadi perumahan, sehingga penelitian ini penulis angkat dengan judul: “Dampak alihfungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan pada perubahan

⁴ Purwaningsih, dkk, *Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga Di Karanganyar Jawa Tengah*, Jurnal Agraris, Volume 1 Nomor 2 (2015), hlm. 99.

sosial ekonomi masyarakat di Desa Duren Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, masalah yang akan ditelaah adalah dampak yang terjadi dengan adanya pengalihfungsian lahan dalam perubahan sosial ekonomi masyarakat Desa, maka rumusan masalah dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana respon masyarakat tentang pengalihfungsian lahan pertanian menjadi perumahan di Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pengalihfungsian lahan pertanian menjadi perumahan di Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang?
3. Bagaimana dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan pada perubahan sosial ekonomi masyarakat di Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang terjadi dengan adanya pengalihfungsian lahan dalam perubahan sosial ekonomi masyarakat desa. Adapun tujuan khusus yang disusun sebagai berikut:

1. Mengetahui respon masyarakat tentang pengalihfungsian lahan pertanian menjadi perumahan di Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang.
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi terhadap alihfungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang.

3. Mengetahui dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan pada perubahan sosial ekonomi masyarakat di Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan mempresentasikan penelitian ini, ada beberapa hal yang dapat dianggap bermanfaat baik secara akademis maupun praktis, antara lain:

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat memperkaya pengetahuan di bidang penataan ruang desa, terutama berkaitan dengan pengalihfungsian lahan pertanian menjadi pemukiman sebagai bagian dari proses pembangunan dan pengaruh industrialisasi. Terutama wawasan, informasi pengetahuan tentang perilaku perubahan sosial ekonomi masyarakat.

2. Kegunaan Teori

Penelitian ini berguna bagi pengembangan teori ilmu sosial khususnya dalam bidang pengalihfungsian lahan pertanian yang berdampak pada perubahan sosial ekonomi masyarakat yaitu teori perubahan sosial dari Himes dan More.

3. Kegunaan Praktis

Secara praktis, bagi pengambilan kebijakan seperti tokoh masyarakat dan pemerintah desa dapat menggunakan penelitian ini untuk mengembangkan lahan pertanian lokal. Hampir setengah bagian Kabupaten Karawang mengalami pengalihfungsian lahan pertanian menjadi perumahan. Dengan mengangkat penelitian ini, maka pengalihfungsian lahan pertanian dapat di kendalikan.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam bidang pertanian, lahan tanah merupakan salah satu faktor produksi yaitu digunakan sebagai tempat dihasilkan produk pertanian yang dijalankan oleh usaha tani dan hasil produksinya dipengaruhi oleh luas sempitnya lahan yang digunakan dalam produksi tersebut.⁵

Alih fungsi lahan merupakan proses perubahan yang menggunakan atau atas lahan untuk meningkatkan nilai manfaat dari sebuah lahan. Menurut Nugroho yang dijelaskan mengartikan alih fungsi lahan sebagai sebuah mekanisme yang memerlukan permintaan dan penawaran lahan atau yang biasa disebut dengan negosiasi. Mekanisme tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor fungsi yang mendorong terjadinya alihfungsi lahan.⁶

Iwan Isa menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya alihfungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian, diantaranya:⁷

1. Kependudukan : semakin meningkatnya jumlah penduduk tentunya akan meningkatkan permintaan kebutuhan lahan untuk difungsikan sebagai perumahan, jasa, industri, dan fasilitas umum lainnya. Begitupun dengan peningkatan taraf hidup masyarakat juga memerlukan suatu lahan.

⁵ Rika Harini, dkk, Analisis Lahan Pertanian Terhadap Produksi Padi Di Kalimantan Utara, *Jurnal Kawistara*, Volume 9 Nomor 1, 2019, hlm. 19.

⁶ Linda Cristi Corolina, dkk, *Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan (Studi Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo)*, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Volume 2 Nomor 2, hlm. 225.

⁷ Randa Nurianansyah Putra, *Implementasi Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kota Batu Sebagai Kawasan Agropolitan.*, 3 Nomor 2. (2015), hlm. 7.

2. Kebutuhan lahan untuk kegiatan non-pertanian seperti digunakan untuk kawasan industri, kawasan perdagangan dan lain sebagainya yang tentunya memerlukan lahan yang luas.
3. Ekonomi : faktor ini berasal dari tingginya *land rent* yang dihasilkan dari kegiatan sektor non-pertanian dibandingkan dengan sektor pertanian. Rendahnya insentif untuk usaha tani salahsatunya disebabkan oleh relatif redahnya harga hasil pertanian yang berfluktuasi sementara biaya produksi yang dikeluarkan cukup tinggi.
4. Faktor sosial dan budaya : adanya hukum waris yang membagikan harga atau tanah (biasanya lahan pertanian) menyebabkan terfragmentasinya tanah pertanian, pada akhirnya tidak memenuhi batas minimum skala ekonomi usaha yang dinilai menguntungkan.
5. Degradasi Lingkungan : degradasi atau penurunan lingkungan terjadi karena kemarau panjang yang dapat mengakibatkan kekurangan air untuk pertanian terutama pada wilayah sawah yang notabene memerlukan banyak air, penggunaan pestisida secara berlebihan yang berdampak pada meningkatnya serangan hama akibat musnahnya predator alami, serta adanya pencemaran air irigasi
6. Otonomi daerah yang lebih mengutamakan pembangunan pada sektor jangka pendek sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan cenderung mendorong peengalihfungsian lahan pertanian menjadi non-pertanian.

7. Lemahnya kebijakan dan penegakkan hukum yang telah ada yang mengatur tentang pengendalian alih fungsi lahan.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan berdampak pada perubahan sosial ekonomi masyarakat tempat wilayah tersebut dialihfungsikan. Perubahan sosial menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi yaitu Semua perubahan dalam pranata sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh perubahan sistem sosial, termasuk perubahan nilai, sikap, dan pola perilaku individu dan masyarakat dalam kelompok sosialnya.⁸

Aspek teori Himes dan More dapat digunakan untuk mempelajari perubahan sosial ekonomi dalam masyarakat ini. Dimensi struktural, dimensi kultural, dan dimensi interaksional, menurut Himes dan More, merupakan tiga dimensi perubahan sosial.⁹

1. Dimensi struktural

Dalam dimensi struktural, menilai bahwa perubahan sosial masyarakat berkaitan dengan perubahan struktural yang berada dalam masyarakat. Yang menyangkut perubahan dalam peranan sehingga menghasilkan peranan baru, peranan dalam struktur kelas sosial, dan perubahan lembaga sosial.

Perubahan tersebut bisa dinilai dengan melihat bertambah dan berkurangnya peranan dalam masyarakat yang menyangkut aspek perilaku dan kekuasaan, terjadinya modifikasi saluran komunikasi diantara peranan, dan terjadinya

⁸ Siti Cholifah dan Sugeng Harianto, *Perubahan Sosial Masyarakat Desa Jamprong Pasca Pendirian SMP Satu Atap*, Jurnal Paradigma, 5 Nomor 3, 2017, hlm . 7.

⁹ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial (Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, Dan Poskolonial) Edisi Revisi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm, 6-8.

perubahan dari sejumlah tipe dan daya fungsi masyarakat sebagai akibat dari struktur tersebut.

Perubahan sosial dari dimensi struktural diantaranya pendidikan, mata pencaharian, ekonomi, status dan peran, stratifikasi sosial, kesetaraan gender, dan disintergrasi sosial.

2. Dimensi kultural

Perubahan sosial dilihat dari dimensi kultural akan menimbulkan terjadinya inovasi budaya. Inovasi budaya ini ditandai dengan adanya teknologi baru sehingga dapat merubah gaya hidup pada masyarakat dengan kebutuhan masyarakat semakin kompleks.

Dari perubahan gaya hidup tersebut akan memunculkan difusi. Difusi adalah faktor eksternal yang dapat menggerakkan terjadinya perubahan sosial tersebut. Adanya inovasi budaya tentunya dipengaruhi oleh budaya lain sehingga bisa timbul pergeseran nilai dan norma pada masyarakat. Adapaun perubahan sosial yang terdapat dalam dimensi kultural adalah gaya hidup, pergeseran budaya, pola pikir, dan penyimpangan sosial.

3. Dimensi interaksional

Perubahan sosial dilihat dari dimensi interaksional penilainnya mengacu pada hubungan sosial di dalam masyarakat. Dimensi ini meliputi perubahan dalam frekuensi. Perkembangan teknologi menyebabkan berkurangnya frekuensi individu untuk saling bertatap muka karena semua kebutuhan untuk berinteraksi

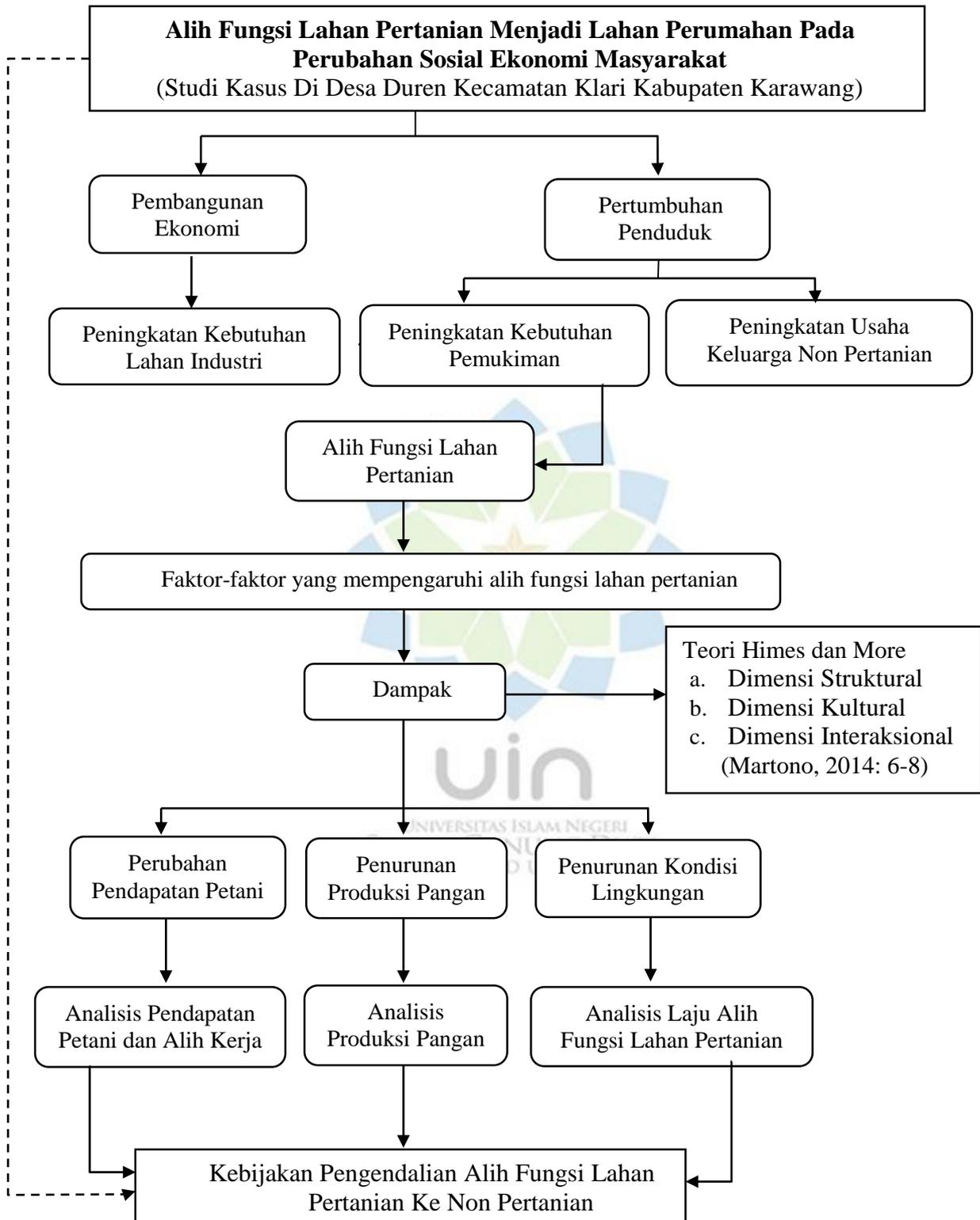
telah dipenuhi dengan adanya teknologi. Selain itu dalam dimensi ini, menyebabkan memicu terjadinya perubahan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.

Alihfungsi lahan pertanian akan membawa konsekuensi yang luas, antara lain perubahan struktur pekerjaan, kepemilikan dan penguasaan lahan, dan pergeseran struktur ekonomi dari pertanian ke industri, serta mobilitas penduduk. Dari segi ekonomi, hal itu akan mengganggu ketahanan pangan produksi pertanian. Beberapa petani akan kehilangan pekerjaan, mengurangi daya beli mereka, karena tidak selalu petani yang mendapat pekerjaan lebih baik.¹⁰

Transformasi ekonomi ditinjau dari perspektif penduduk asli dan penduduk pendatang. Sementara itu, mata pencaharian, keterampilan, kerabat, kelembagaan, strata sosial, kontrol sosial, dan mobilitas penduduk semuanya dapat dianggap sebagai indikator transformasi sosial.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar kerangka konseptual sebagai berikut:

¹⁰ Nurma Kumala Dewi dan Iwan Rudiarto, *Identifikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah Pinggiran Di Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang*, Laredem : Jurnal Wilayah Dan Lingkungan, Volume 1 Nomor 2, 2013, hlm. 179.



Gambar 1. 1 Skema Kerangka Berpikir



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG